Peran PKn dalam mengembangkan kecerdasan kewargaan untuk membentuk keadaban publik

Septia Putri Anggraeni, Nadya Putri Saylendra, Karna Januar

Universitas Buana Perjuangan, Karawang

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diterima: 20/12/2021

Disetujui: 31/12/2021

Kata kunci

Kewarganegaraan;

Keberadaban; PKn;

Ranah publik

Keywords

citizenship; civility;

PKn; public domain

ABSTRAK

Moralitas adalah unsur pertama dalam membangun keadaban publik, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, kini kata ramah seperti sudah absen dalam masyarakat kita. Namun, seiring dengan melesatnya perkembangan jaman serta kemajuan teknologi membuat bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami kemerosotan moral, hal ini didukung oleh adanya krisis pemudaran keadaban publik. Penistaan, hinaan, bahkan ancaman yang terjadi dan mudah ditemukan di berbagai ruang publik di sejumlah wilayah negeri tercinta ini. Semua ini menunjukkan bagaimana kesopanan publik dalam masyarakat kita telah memudar cukup parah. Perilaku moral diseluruh bidang kehidupan belum menuju pada tingkat keadaban publik yang kita harapkan. Tidak hanya pemerintah dan aparat setempat saja yang harus mampu menjamin kebaikan umum, tetapi seluruh masyarakat pun harus turut andil dalam mewujudkan keadaban publik yang lebih baik. Memang tidak semua anggota masyarakat kehilangan sikap dan perilaku yang mencerminkan keadaban. Namun, ironisnya, mereka terkadang memilih bungkam dalam menyikapi fenomena menyedihkan ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Studi literatur disebut juga dengan bibliografi. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber bacaan yang memenuhi syarat ilmiah, seperti buku, laporan penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, karya ilmiah, dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pengajaran pendidikan PKn dalam mengembangkan warga negara yang cerdas untuk memupuk keberadaban di ranah publik memiliki pengaruh besar serta menjadi dasar pedoman bagi kewarganegaraan.

ABSTRACT

Morality is the first element in building public civility, the Indonesian nation is known as a friendly nation, now the word friendly doesn't exist in our society. However, along with the rapid development of the times and technological advances that make the Indonesian nation currently experiencing a moral decline, this is supported by a crisis of fading public civility. Blasphemy, insults, even threats that occur and are easily found in various public spaces in a number of areas of this beloved country. All of this shows how public decency in our society has faded quite badly. Moral behavior in all areas of life has not yet reached the level of public civility that we expect. Not only the government and local officials must be able to guarantee public safety, but the whole community must also participate in realizing a better public civility. Indeed, not all members of society lose attitudes and behaviors that reflect civility. But ironically, they sometimes choose to remain silent in responding to this phenomenon. The method used in this research is library research. Literary studies are also known as bibliography. Literature studies are carried out by examining various reading sources that meet scientific requirements, such as books, research reports, magazines, newspapers, scientific works, and so on. The results of this study indicate that the role of civic education teaching in developing intelligent citizens to foster public civility has a great influence and becomes the basic guideline for citizenship.

Pendahuluan

Keadaban di ranah publik pada saat ini telah menurun, tentunya ini merupakan masalah yang serius bagi negara Indonesia yang sudah memiliki ciri khas akan keramahan bangsanya. Kondisi seperti ini tentu menurut Zuhro (Permana & Yulianto, 2018) dapat memancing masyarakat untuk melakukan tindakan anarkis, beberapa kerusakan terjadi dari berbagai macam kalangan Masyarakat Indonesia saat ini dikenal sebagai bangsa yang sopan-santun, ramah tamah dan penuh keadaban. Sekarang sebagian terjebak ke dalam perilaku kekerasan dan bentuk-bentuk ketidakadaban lainnya. Beliau juga mengatakan, raibnya keadaban

Korespondensi: Septia Putri Anggraeni, pk21.septiaanggraeni@mhs.ubpkarawang.ac.id,

Universitas Buana Perjuangan, Karawang.

<http://seminar.uad.ac.id/index.php/snk/>

publik ditandai dengan adanya persekusi oleh sekelompok orang dengan kelompok lain, kriminalisasi lawan politik, pembegalan di jalan raya, dan ketakadaban menguasai ruang publik di media sosial serta ruang-ruang dialog televisi. Pendapat diatas menunjukkan bahwa perilaku moral diseluruh bidang kehidupan belum menuju pada tingkat yang diharapkan. Apa yang dibutuhkan dalam kondisi seperti ini? Jawabannya adalah pendidikan kewarganegaraan untuk mengembalikan moralitas bangsa yang lebih baik lagi. Membahas mengenai keadaban tentu saja tidak dapat terlepas dari kata moral dan pendidikan kewarganegaraan, karena keduanya selalu berdampingan. Moralitas merupakan unsur pertama dalam membangun keadaban publik. Dan mengapa harus PKn? Karena PKn menurut Susiatik (Juliardi, 2015) memiliki salah satu misi sebagai pendidikan karakter, di samping misi lain sebagai pendidikan politik/pendidikan demokrasi, pendidikan moral, dan pendidikan hukum di setiap jenis dan jenjang pendidikan. Dibandingkan dengan mata pelajaran lain, PKn (di samping Pendidikan Agama) memiliki posisi sebagai ujung tombak dalam pendidikan karakter. Maksudnya dalam kedua mata pelajaran tersebut pendidikan karakter harus menjadi tujuan pembelajaran. PKn disini sebagai ujung tombak yang tajam bagi pendidikan karakter dan moral. Dalam penulisan ini difokuskan pada upaya untuk mengembalikan moralitas bangsa dalam keberadaban terutama di ranah publik.

1. Pendidikan Kewarganegaraan

Kata kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut *Civicus*. Selanjutnya, kata *Civicus* diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata *Civic* yang artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata *Civic* lahir kata *Civics* yaitu ilmu kewarganegaraan, dan *Civic Education*, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Pelajaran *Civics* atau kewarganegaraan telah dikenal di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda dengan nama *Burgerkunde*. Sedangkan arti Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang dilaksanakan pada semua lembaga pendidikan formal mulai dari sekolah dasar sampai pada perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan memiliki posisi penting dalam rangka membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Kedudukan pendidikan kewarganegaraan sangat strategis dalam menanamkan watak dan kepribadian berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Winataputra (2001) mengartikan pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bidang kajian yang memiliki objek kajian telaah dan budaya kewarganegaraan, dengan menggunakan disiplin ilmu yang relevan, secara koheren, diorganisasikan dalam bentuk sosial-kultural kewarganegaraan. Sedangkan, Somantri (2001) mendefinisikan Pendidikan Kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia sebagai program pendidikan yang memuat demokrasi politik yang ditambah dengan pengetahuan lainnya, guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Secara holistik pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar setiap warga negara muda (*young citizens*) memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan komitmen Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen bernegara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu secara sadar dan terencana peserta didik sesuai dengan perkembangan dan psikologis dan konteks kehidupannya secara sistemik difasilitasi untuk belajar berkehidupan demokrasi secara utuh, yakni belajar tentang demokrasi (*learning about democracy*), belajar dalam iklim dan melalui proses demokrasi (*learning through democracy*) dan belajar untuk membangun demokrasi (*learning for democracy*) (Winataputra & Budimansyah, 2012).

Untuk itu Pendidikan Kewarganegaraan secara psiko pedagogis/andragogic dan sosiokultural dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks pengembangan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*) yang secara psikososial tercermin dalam penguasaan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), perwujudan sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*), penampilan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), pemilikan komitmen

kewarganegaraan (*civic commitment*), pemilikan keteguhan kewarganegaraan (*civic confidence*), dan penampilan kecakapan kewarganegaraan (*civic competence*) yang kesemua itu memancar dari dan mengkristal kembali menjadi kebijakan/keadaban kewarganegaraan (*civic virtues/civility*). Keseluruhan kemampuan itu merupakan pembekalan bagi setiap warga negara untuk secara sadar melakukan partisipasi kewarganegaraan (*civic participation*) sebagai perwujudan dari tanggung jawab kewarganegaraan (*civic responsibility*) (Muhammad Numan Somantri & Udin Saripudin Winataputra, 2017) .

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada warga negara melalui proses pendidikan lembaga negara agar menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif sebagai warga negara dan dapat membentuk warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

3. Keadaban

Keadaban atau civility berasal dari kata *civis*, yang dalam bahasa Latin berarti warga negara. Meriam Webster mendefinisikan kesopanan sebagai perilaku beradab. Sedangkan secara historis, kesopanan juga berarti pelatihan dalam humaniora. Arti kesopanan atau keberadaban muncul pada pertengahan abad ke-16 banyak ahli tentang kesopanan mengutip bahwa kesopanan sebenarnya melampaui sopan-santun dan mendengarkan dengan penuh perhatian, namun sebenarnya kesopanan termasuk kepada berbagai keyakinan dan nilai-nilai kita sendiri dan orang lain melalui beberapa jenis keterlibatan dengan maksud rasa hormat yang tulus satu sama lain. Para ahli juga mengatakan bahwa kemampuan kita untuk bertindak dengan kesopanan dan keadaban sangat terkait dengan kemampuan kita untuk memahami emosi kita sendiri.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen) (Sukmadinata, 2012). Menurut Farisi (2010) yang mengutip pendapat Cooper dan Taylor, penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review, literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologinya untuk topik tertentu.

Tujuan penelitian kepustakaan atau studi literatur adalah untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara deskriptif data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

Hasil dan Pembahasan

Seringkali kita menemukan banyak kasus yang telah terjadi baik di media maupun di beberapa tempat pada ranah publik, yang mencerminkan betapa rusaknya karakter serta moralitas bangsa. Ini menjadi pembuktian bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengimplementasikan pendidikan karakter serta pendidikan moral dalam aspek-aspek kehidupan. Membuktikan bahwa betapa pentingnya pembangunan karakter serta moral bangsa Indonesia untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Karakter bangsa merupakan kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang unik-baik tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang (Kemendiknas, 2010). Maka dari itu, individu yang memiliki jiwa Pancasila, memiliki nilai-nilai karakter berdasarkan sumbernya sebagai berikut: *Satu*, olah hati, antara lain beriman dan

bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat peraturan, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. *Kedua*, olah pikiran diantaranya seperti cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif (mampu menghasilkan sesuatu), berorientasi iptek dan reflektif. *Ketiga*, olah raga diantaranya seperti bersih, sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif (mampu bekerja sama), kompetitif, ceria dan gigih. *Keempat*, olah rasa dan karsa diantaranya kemanusiaan, bergotong royong, kebersamaan, saling menghormati, bertoleransi, berjiwa nasionalis, peduli, kosmopolit (mendunia), mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja (Kemendiknas, 2010).

Dalam lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman berbunyi ‘...Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya’ pesan tersebut disampaikan mengenai pentingnya membangun karakter bagi bangsa. Dalam lirik lagu tersebut dituliskan membangun ‘jiwa’ sebagai lirik yang lebih dulu sebelum membangun ‘badan’, artinya bahwa membangun jiwa yang sehat dan baik lebih diutamakan sebelum membangun badan. Bukan berarti membangun badan tidak penting, hanya saja kita memerlukan jiwa atau karakter yang baik dan kita membutuhkan badan yang sehat untuk merealisasikan atau mencerminkan karakter yang baik (Akbal, 2016).

Menurut Undang-Undang RI, No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Bunyi sila kedua pada Pancasila ialah: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, makna sila kedua pancasila ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Manusia yang adil dan beradab maksudnya adalah kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi. Karena itu, kita harus mewujudkannya melalui sikap yang adil dan beradab. Seperti, menghargai, menghormati, dan mencintai satu sama lain.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian mengenai peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kecerdasan kewargaan untuk membentuk keadaban publik merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia, dalam upaya untuk membentuk keadaban diberbagai tempat, baik di media maupun di berbagai ranah publik lainnya. Agar ciri khas keramahmatan yang melekat pada bangsa Indonesia tidak terhapuskan. Melalui PKn diharapkan bisa menghadirkan kembali generasi yang kuat, kokoh dan konsisten dengan Pancasila dan UUD 1945. Pemilihan Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bukan sesuatu yang kebetulan, melainkan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Dengan mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan para generasi memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan juga dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memahami pendidikan anti-korupsi. Selain itu diharapkan tumbuh dan berkembang secara positif dan demokratis pembentukan diri mereka berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya, dan yang terpenting lagi adalah mereka dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat mendukung pembentukan generasi milenial yang kuat, tangguh dan konsisten meliputi aspek-aspek sebagai berikut. *Pertama*: Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan

Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. *Kedua*: Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. *Ketiga*: Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. Keempat: Kebutuhan warga negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. *Kelima*: Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. Pendidikan kewarganegaraan idealnya harus diketahui dan dipelajari oleh seluruh bangsa dan rakyat Indonesia terutama bagi generasi milenial. Mengapa Pendidikan Kewarganegaraan ini sangat penting bagi generasi milenial? Karena mereka akan:

- a. Menjadi pribadi yang mengetahui akan hak serta kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia. Dengan demikian generasi milenial dapat menjadi pelopor kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan, berkemanusiaan, dan berdemokrasi.
- b. Berpikir kritis mengenai isu nasional dan internasional. Diharapkan, generasi milenial menjadi agent of change atau agen pembaharu yang mendorong perubahan pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi secara berkelanjutan.
- c. Menjadi pribadi yang mempunyai toleransi tinggi dengan cara memahami budaya dan adat dari segala suku, bahasa, bangsa di Indonesia. Dengan begitu, generasi milenial bisa menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki toleransi tinggi terhadap adat, suku, bahasa dan budaya yang plural dan majemuk.
- d. Menjadi pribadi yang cinta damai. Dengan belajar bagaimana berdemokrasi yang baik dan benar diharapkan generasi milenial bisa menjadi sosok penerus bangsa yang demokratis dan cinta damai, sehingga tujuan demokrasi Pancasila di Indonesia bisa tercapai.
- e. Menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam memberi makna dalam kehidupan (Putri & Dewi, 2021).

Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditularkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.).

Dalam perkembangannya selama Indonesia merdeka telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itulah pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa.

Indonesia di masa depan semakin baik kehidupan demokrasi dalam arti sistem pemerintahan semakin terjamin hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan organisasi non pemerintah perlu dikenal, dimulai, diinternalisasi, dan diterapkan demi kejayaan bangsa dan

negara Indonesia. Demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga oleh warga negara yang demokratis. Warga negara yang demokratis bukan hanya menikmati hak kebebasan individu, tetapi juga harus memikul tanggung jawab secara bersama-sama dengan orang lain untuk membentuk masa depan yang cerah. Sesungguhnya, kehidupan yang demokratis adalah cita-cita yang dicerminkan dan diamanatkan oleh pendiri bangsa dan negara ketika mereka pertama kali membahas dan merumuskan Pancasila dan UUD 1945.

Inti dari kepribadian warga negara adalah kebijakan kewarganegaraan (*civic virtues*). Pengembangan kebijakan kewarganegaraan perlu ditopang dengan pengembangan elemen-elemennya yakni: wawasan/pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), keterampilan kenegaraan (*civic skills*), komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*), kepercayaan diri kewarganegaraan (*civic confidence*), dan kecakapan kewarganegaraan (*civic competence*) (Sutiyono, 2017). Secara keseluruhan kebijakan kenegaraan tersebut sangat diperlukan oleh setiap orang agar mau dan mampu mewujudkan partisipasi kewarganegaraan secara cerdas dan bertanggung jawab (*intelligent and responsible civic participation*). Berkenaan dengan hal-hal yang di uraikan di atas, pendidikan memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mempersiapkan warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan program pendidikan yang memberikan berbagai kemampuan sebagai seorang warga negara melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship*). Keluarga, tokoh-tokoh keagamaan dan kemasyarakatan, media massa, dan lembaga lainnya yang bekerja sama dan memberikan kontribusi yang kondusif terhadap tanggung jawab pendidikan tersebut. Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship*) merupakan mata kuliah yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945.

Kesimpulan

Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dengan memakai produk negaranya sendiri dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Pendidikan Kewarganegaraan bagi generasi milenial sebagai salah satu pilar penyangga dalam membangun karakter dan jati diri bangsa artinya bahwa pendidikan kewarganegaraan mendidik warga negara yang baik (*good citizen*), warga negara yang cerdas (*smart citizen*) dalam menghadapi perkembangan dunia di era kompetitif. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan memberi bekal kepada warga negara terutama bagi generasi milenial baik itu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Kecerdasan yang dimiliki seorang warga negara diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berpikir dalam menganalisis dalam berbagai masalah.

Pendidikan Kewarganegaraan juga menjadi salah satu pilar penyangga dalam membangun karakter dan jati diri bangsa artinya bahwa pendidikan kewarganegaraan mendidik warga negara menjadi warga negara yang baik, warga negara yang cerdas dalam menghadapi perkembangan dunia di era kompetitif. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan memberi bekal kepada warga negara baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan yang dimiliki seorang warga negara diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berpikir dalam menganalisis dalam berbagai masalah. Untuk itu, warga negara harus memiliki sejumlah keterampilan (*skill*) baik keterampilan berpikir, berkomunikasi, berpartisipasi, bahkan keterampilan dalam memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dalam kehidupan bernegara.

PKn merupakan pembelajaran yang mendasari bagi warga negaranya untuk memiliki karakter bangsa yang baik dan berbudi luhur. Namun begitu, untuk dapat membentuk karakter bangsa yang baik tersebut bukan hanya tanggung jawab lembaga pendidikan semata, tetapi orang tua, keluarga dan lingkungan sekitar pun memiliki peran penting dalam pembangunan karakter.

Untuk itu, lembaga pendidikan, orang tua dan juga lingkungan sekitar harus bekerja sama dalam pembentukan karakter bangsa. Jika salah satunya tidak dapat mendukung pembentukan karakter, maka jangan menyalahkan kepada salah satu pihak saja apabila pembentukan karakter yang dibangun justru tidak membuahkan hasil yang maksimal, karena pembentukan karakter bangsa tidak hanya tanggung jawab salah satu pihak saja.

Daftar Pustaka

- Akbal, M. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa. *Seminar Nasional Kewarganegaraan Transformatif dalam Masyarakat Multikultur Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global*, 485–493.
- Juliardi, B. (2015). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 2(2), 3.
- Kemendiknas. (2010). *Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa*. Kementerian Pendidikan Nasional.
- Permana, F. E., & Yulianto, A. (2018). *Raibnya Keadaban Publik dari Masyarakat*. Republika Online. <https://www.republika.co.id/berita/pke55u396/raibnya-keadaban-publik-dari->
- Putri, S. B., & Dewi, D. A. (2021). Reaktulisasi Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Milenial. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 3(2), 42–49.
- Somantri, Mohammad Nu'man. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Remaja Rosdakarya dan PPs UPI.
- Somantri, Muhammad Numan, & Udin Saripudin Winataputra. (2017). *Disiplin Pendidikan Kewarganegaraan Kultur Akademik dan Pedagogis* (Sapriya (Ed.); Edisi pert). Penerbit Laboratorium PKn, Bandung.
- Sukmadinata, N. S. (2012). *Metode penelitian pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Sutiyono. (2017). Pengembangan Civic Skills Melalui Seminar Socrates Dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 59–67. <https://doi.org/10.24269/v2.n2.2017.59-67>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Winataputra, U. S. (2001). *Jatidiri pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (Ed.). (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional: Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran*. Widya Aksara Press.